

PENGUATAN TATA KELOLA TRANSPORTASI MELALUI RAPAT KOORDINASI DAN SOSIALISASI KEBIJAKAN TARIF ANGKUTAN DARAT KELAS EKONOMI

Strengthening in Transportation Governance Through Coordination Meetings and Socialization of Economic Class Land Transportation Tariff Policies

Syaiful¹
Ringo Taufan Laode²
Rina Sutriana³
Maudhy Satyadharma⁴
Neni Susanti^{5*}
Muh. Yazid Jabbar⁶

^{*1,2,3,4,5,6} Dinas Perhubungan
Provinsi Sulawesi Tenggara

Email :
nsdinas84@gmail.com

Abstrak

Penguatan tata kelola transportasi memerlukan sinergi antarpemangku kepentingan melalui forum strategis seperti rapat koordinasi dan sosialisasi kebijakan tarif. Kegiatan ini berperan penting dalam memastikan implementasi tarif angkutan darat kelas ekonomi berjalan transparan, adil, dan sesuai regulasi. Kegiatan Rapat ini dilaksanakan pada tanggal 8 Desember 2025 dengan melibatkan Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara, Dinas Perhubungan Kab/Kota Se Sulawesi Tenggara, Perum Damri dan Badan Hukum Angkutan Penumpang. Hasil kegiatan ini menyimpulkan bahwa Melalui rapat koordinasi, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dapat menyelaraskan data operasional, menyepakati mekanisme pengawasan, serta mengidentifikasi kendala di lapangan Sementara itu, sosialisasi kebijakan tarif bertujuan meningkatkan pemahaman operator, pengemudi, dan masyarakat tentang struktur tarif yang ditetapkan, sehingga meminimalkan resistensi dan potensi pelanggaran. Upaya terpadu ini diharapkan mampu menciptakan sistem transportasi yang akuntabel, berkelanjutan, dan responsif terhadap kebutuhan mobilitas publik.

Abstract

Strengthening transportation governance requires synergy between stakeholders through strategic forums such as coordination meetings and socialization of tariff policies. This activity plays a crucial role in ensuring that the implementation of economy class land transportation tariffs is transparent, fair, and in accordance with regulations. This meeting activity was held on December 8, 2025, involving the Southeast Sulawesi Provincial Transportation Agency, the Regency/City Transportation Agency throughout Southeast Sulawesi, Perum Damri and the Passenger Transportation Legal Entity. The results of this activity concluded that Through coordination meetings, provincial and district/city governments can align operational data, agree on monitoring mechanisms, and identify obstacles in the field. Meanwhile, the socialization of tariff policies aims to increase the understanding of operators, drivers, and the public about the established tariff structure, thereby minimizing resistance and potential violations. This integrated effort is expected to create a transportation system that is accountable, sustainable, and responsive to public mobility needs.

Kata Kunci:
Kolaborasi
Rapat Koordinasi
Tarif Angkutan
Transportasi

Keywords:
Collaboration
Coordination Meeting
Transportation Fares
Transportation



PENDAHULUAN

Transportasi darat merupakan tulang punggung pergerakan orang dan barang di berbagai wilayah di Indonesia, terutama di daerah yang belum terlayani moda transportasi lain seperti kereta api atau transportasi laut reguler (Marlina and Natalia, 2017; Rahayu and Martini, 2022; Dwi Astuti *et al.*, 2023). Perannya sangat strategis dalam mendukung konektivitas wilayah, pemerataan pembangunan, dan dinamika ekonomi masyarakat (Kadarisman, Gunawan and Ismiyati, 2016). Namun demikian, berbagai persoalan teknis maupun kebijakan masih sering muncul, khususnya pada sektor angkutan darat kelas ekonomi yang menyentuh kelompok masyarakat berpenghasilan rendah (Laode *et al.*, 2025).

Salah satu persoalan mendasar yang dihadapi dalam penyelenggaraan transportasi darat di banyak wilayah tanah air adalah ketidakteraturan penetapan dan implementasi tarif angkutan umum (Muñoz, Soza-Parra and Raveau, 2020; Lukow, Rares and Kawung, 2023). Perbedaan kondisi geografis, perbedaan kemampuan ekonomi masyarakat, disparitas biaya operasional kendaraan, serta koordinasi yang belum optimal antarinstansi menyebabkan implementasi kebijakan tarif sering tidak berjalan konsisten (Abdurrahman and Febrianty, 2017; Jalil, Anggraini and Sugiarto, 2018; Herdiani, Sakinah and Rohimat, 2021). Selain itu, pengawasan yang lemah dan rendahnya sosialisasi kepada operator maupun pengguna angkutan memicu terjadinya disparitas tarif, pungutan liar, serta menurunnya kualitas pelayanan (Harahap, 2019; Tambuk, Aloysius and Mauritsius, 2023; Ibrahim, Ahmad and Moonti, 2024; Satyadharma, 2024).

Tarif Angkutan Darat Kelas Ekonomi di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara sudah diterbitkan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 27 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara tentang Penetapan Tarif Jarak Angkutan Kabupaten/Kota Kelas Ekonomi di Jalan dengan Mobil Bus/Mobil Penumpang Umum dalam Provinsi Sulawesi Tenggara namun implementasinya di lapangan belum berjalan optimal karena minimnya sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara kepada publik. Kondisi ini menyebabkan sebagian besar masyarakat tidak mengetahui tarif resmi yang berlaku, sehingga masih sering terjadi praktik penetapan tarif yang tidak sesuai, baik oleh oknum pengemudi maupun operator angkutan. Ketidaktahuan masyarakat membuat posisi mereka lemah dalam menolak tarif yang tidak wajar, sekaligus menghambat upaya pemerintah dalam menegakkan aturan. Di sisi lain, operator dan pengemudi juga tidak seluruhnya memahami struktur tarif yang telah ditetapkan sehingga penerapan tarif menjadi tidak seragam antartrayek maupun antarwilayah.

Dalam sudut pandang tersebut, penguatan tata kelola melalui Rapat Koordinasi (Rakor) dan Sosialisasi Kebijakan Tarif Angkutan Darat Kelas Ekonomi merupakan langkah strategis. Kegiatan ini dilaksanakan untuk mendukung penyamaan persepsi, penyelesaian masalah lapangan, serta penguatan kapasitas pemangku kepentingan dalam menerapkan kebijakan tarif yang transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan. Rapat ini sekaligus menjadi wadah sosialisasi yang efektif kepada banyak pemerintah daerah di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara dan dianggap sebagai kebutuhan mendesak dalam memastikan transparansi, mencegah praktik tarif liar, melindungi konsumen, serta membangun kesadaran bersama mengenai pentingnya kepatuhan terhadap ketentuan tarif Angkutan Darat kelas ekonomi.

Kegiatan ini juga menegaskan pentingnya kolaborasi pemerintah provinsi sebagai regulator utama, pemerintah kabupaten/kota sebagai pelaksana layanan di wilayah masing-masing, serta operator angkutan sebagai penyedia jasa. Integrasi kebijakan yang baik akan berdampak pada meningkatnya kualitas layanan publik, perlindungan konsumen, peningkatan kepatuhan operator, serta kestabilan sosial-ekonomi masyarakat.

Tujuan dilaksanakannya Rapat Koordinasi dan Sosialisasi ini antara lain mendorong peningkatan pemahaman stakeholder terkait Tarif Angkutan Darat Kelas Ekonomi, mendorong harmonisasi pelaksanaan kebijakan antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kab/Kota Se-Sulawesi Tenggara, mengidentifikasi permasalahan lapangan yang dihadapi oleh seluruh Dinas Perhubungan di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara serta menyusun rekomendasi bersama sebagai dasar penguatan tata kelola transportasi di tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara dan diharmonisasi di tingkat Kab/Kota Se-Sulawesi Tenggara.

METODE

Metode pelaksanaan kegiatan disusun agar mampu menghasilkan pemahaman yang komprehensif serta membangun komitmen lintas pemangku kepentingan. Adapun metode yang digunakan meliputi:

a. Rapat Koordinasi Teknis

Rakor dilakukan dengan melibatkan perwakilan Dinas Perhubungan Provinsi, Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota, Perum Damri dan asosiasi operator angkutan. Rapat difokuskan pada permasalahan terkait Angkutan Penumpang, tantangan implementasi, serta pembagian kewenangan dalam penyelenggaraan Transportasi darat.



Gambar 1 Rapat Koordinasi terkait Penetapan Tarif Angkutan Kelas Ekonomi Tahun 2025
Sumber : Dishub Sultra (2025)

b. Sosialisasi Kebijakan Tarif

Tim menyampaikan materi terkait Penetapan Tarif Angkutan Penumpang Antar Kab/Kota dalam 1 provinsi dalam Peraturan Gubernur kepada peserta rapat baik itu perwakilan Dinas Perhubungan Kab/Kota se Provinsi Sulawesi Tenggara, Perum Persero Damri maupun yang mewakili Sopir Angkutan Antar Kab/Kota dalam 1 Provinsi.

c. Diskusi Kelompok Terarah (FGD)

FGD dilakukan untuk mengidentifikasi permasalahan lapangan, hambatan operasional, serta aspirasi masyarakat dan operator. FGD juga digunakan untuk menyusun solusi dan rekomendasi yang realistis.

d. Penyusunan Masukan dan Rekomendasi

Seluruh masukan, temuan, dan analisis dirumuskan menjadi rekomendasi bersama untuk ditindaklanjuti di lapangan,

HASIL DAN PEMBAHASAN

Adapun materi sosialisasi dan edukasi ini terdiri dari :

a. Pemaparan oleh Kepala Bidang Angkutan Jalan

Beberapa point dalam pemaparan ini antara lain :

1) Pentingnya Mobilitas dan Peran Pemerintah dalam Transportasi Umum

Mobilitas merupakan kebutuhan universal yang memerlukan sarana dan prasarana umum agar dapat diakses bersama. Pemerintah berperan menjaga keseimbangan hak dan kewajiban pengguna jasa serta penyedia jasa dengan menetapkan standar keselamatan, pelayanan, jaringan, dan tarif untuk menjamin layanan transportasi yang layak (Maruru *et al.*, 2024).

2) Penurunan Kinerja Angkutan Umum dan Dampaknya

Kinerja angkutan umum di banyak wilayah Sulawesi Tenggara menurun, terlihat dari waktu tunggu panjang, alih fungsi kendaraan, dan standar pelayanan yang tidak terpenuhi (Winter *et al.*, 2018). Kondisi ini mendorong masyarakat beralih ke transportasi pribadi sehingga memperburuk kemacetan, menurunkan keselamatan, dan melemahkan keberlanjutan angkutan publik (La Ode *et al.*, 2024).

3) Ketidakseimbangan Tarif dan Tekanan terhadap Operator serta Penumpang

Tarif angkutan ekonomi belum mencerminkan biaya operasional yang sebenarnya, membuat operator kesulitan menyediakan layanan berkualitas (Sajiwo, 2023; Elisabeth and Yohanes, 2024). Di sisi lain, masyarakat menuntut tarif terjangkau. Ketimpangan ini memicu konflik antara sopir dan pengguna jasa terkait tarif angkutan, negosiasi liar, serta penurunan perawatan kendaraan yang membahayakan keselamatan penumpang (Muguro, Njeri and Sasaki, 2024).

4) Urgensi Sosialisasi Pergub Tarif dan Penguatan Collaborative Governance

Perbedaan implementasi tarif antarwilayah terjadi karena minim koordinasi. Rakor diperlukan untuk menyatukan persepsi, menghindari konflik pengguna–sopir, dan memastikan Pergub diterapkan konsisten. Pendekatan collaborative governance menjadi kunci mengatasi persoalan transportasi karena menuntut kerja bersama, bukan sektoral (Wibowo, 2020).



Gambar 2 Rapat Koordinasi terkait Penetapan Tarif Angkutan Kelas Ekonomi Tahun 2025
Sumber : Dishub Sultra (2025)

b. Pemaparan Oleh Kepala Seksi Angkutan Tidak Dalam Trayek dan Angkutan Barang

Beberapa point pembahasan ini antara lain :

1) Tantangan Penyelenggaraan Transportasi Darat di Sulawesi Tenggara

Kondisi sektor perhubungan menunjukkan bahwa kualitas transportasi darat belum optimal akibat lemahnya koordinasi, kurangnya SDM, dan kompleksitas regulasi (Ahasan *et al.*, 2023). Hal ini berdampak pada rendahnya keselamatan, kenyamanan, serta daya saing layanan, sehingga membutuhkan penguatan peran Dishub provinsi dan kabupaten/kota.

2) Ketidakseimbangan Tarif AKDP dan Dampaknya terhadap Layanan

Fakta tarif AKDP memperlihatkan tekanan besar pada operator akibat persaingan transportasi online, meningkatnya biaya operasional, dan daya beli masyarakat yang fluktuatif. Ketidakseimbangan tarif memicu negosiasi liar, konflik sopir–penumpang, serta penurunan kualitas armada dan keselamatan perjalanan.

3) Pentingnya Sosialisasi Pergub Tarif dan Pengawasan Bersama

Implementasi Pergub tarif AKDP memerlukan pemahaman seragam antara pemerintah, operator, dan masyarakat. Sosialisasi melalui Rakor menjadi strategi untuk mencegah konflik, memperkuat transparansi, dan memastikan tarif diterapkan konsisten melalui pengawasan bersama yang melibatkan provinsi, kabupaten/kota, badan hukum, dan Organda.

Adapun hasil evaluasi dari penyajian materi yang diberikan kepada para peserta akan terlihat dalam Tabel 1 berikut.

Tabel I. Hasil Sosialisasi dan Rapat Koordinasi

No	Item	Sebelum Sosialisasi		Setelah Sosialisasi	
		Jumlah	Persen	Jumlah	Persen
1	Pemahaman mengenai pentingnya kehadiran pemerintah dalam penyelenggaraan transportasi	51	100	51	100
2	Pemahaman mengenai Tarif Angkutan Darat Kelas Ekonomi saat ini	20	39	51	100
3	Pemahaman mengenai Izin Angkutan Penumpang dan mekanismenya	20	39	51	100
4	Pemahaman dan Kesadaran untuk berkolaborasi dan bersinergi dalam penyelenggaraan transportasi	51	100	51	100

Sumber : Data Primer (2025)

Tabel 1 menunjukkan bahwa sosialisasi dan rapat koordinasi memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan pemahaman peserta, khususnya pada aspek teknis kebijakan transportasi. Sebelum sosialisasi, pemahaman mengenai Tarif Angkutan Darat Kelas Ekonomi dan mekanisme perizinan angkutan penumpang hanya mencapai 39%, menandakan masih rendahnya literasi regulasi di kalangan pemangku kepentingan. Setelah sosialisasi, kedua aspek tersebut meningkat menjadi 100%, memperlihatkan efektivitas penyampaian materi dan diskusi interaktif. Sementara itu, pemahaman mengenai peran pemerintah dan kolaborasi antarinstansi sudah tinggi sejak awal (100%), namun sosialisasi tetap memperkuat komitmen bersama (Nuhun *et al.*, 2024; Satyadharma and Susanti, 2024). Secara keseluruhan, kegiatan ini berhasil menyatukan persepsi dan meningkatkan kapasitas peserta dalam tata kelola transportasi.

Peningkatan pemahaman yang sangat signifikan setelah sosialisasi menunjukkan bahwa hambatan utama dalam implementasi kebijakan transportasi bukan terletak pada kurangnya regulasi, tetapi pada minimnya pemahaman dan penyebaran informasi kepada pihak yang terlibat langsung di lapangan. Fakta bahwa pemahaman tarif dan mekanisme perizinan meningkat dari 39% menjadi 100% mengindikasikan bahwa peserta sebenarnya memiliki kebutuhan informasi yang tinggi namun belum difasilitasi sebelumnya. Selain itu, hasil ini menunjukkan bahwa metode sosialisasi yang digunakan meliputi penyampaian materi, diskusi, dan tanya jawab sangat efektif dalam membangun pemahaman teknis yang komprehensif. Walaupun aspek peran pemerintah dan kolaborasi (*collaboarative governance*) sudah dipahami dengan baik sejak awal, peningkatan konsistensi persepsi pascasosialisasi memperkuat fondasi kerja sama lintas instansi (Satyadharma *et al.*, 2024). Ketika para pemangku kepentingan memiliki interpretasi regulasi yang sama, proses pengawasan menjadi lebih efektif, potensi konflik kebijakan dapat diminimalkan, dan kualitas pelayanan publik meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa sosialisasi bukan hanya proses penyampaian informasi, tetapi instrumen strategis untuk konsolidasi komitmen bersama. Temuan ini menegaskan bahwa

sosialisasi harus menjadi agenda berkelanjutan untuk memastikan kebijakan dan informasi terkait perhubungan berjalan konsisten, dipahami merata, dan diimplementasikan secara efektif di seluruh wilayah (Syaiful *et al.*, 2024; Satyadharma *et al.*, 2025).

KESIMPULAN

Penguatan tata kelola transportasi melalui kegiatan Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Kebijakan Tarif Angkutan Darat Kelas Ekonomi terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman, komitmen, dan koordinasi antar pemangku kepentingan. Kegiatan ini juga memberikan kontribusi nyata dalam menyamakan persepsi regulasi, meningkatkan transparansi informasi tarif, serta memperkuat pengawasan di lapangan.

Kegiatan ini menegaskan bahwa tata kelola transportasi yang baik tidak dapat berjalan tanpa adanya kolaborasi yang kuat antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, operator angkutan, dan masyarakat. Melalui upaya bersama, kebijakan tarif dapat diterapkan secara adil, konsisten, dan memberikan manfaat optimal bagi seluruh pengguna layanan.

Rekomendasi penelitian ini meyakini bahwa penguatan tata kelola transportasi perlu dilanjutkan melalui rapat koordinasi dan sosialisasi secara berkala untuk memastikan konsistensi penerapan kebijakan tarif angkutan darat kelas ekonomi. Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota perlu memperkuat kolaborasi dengan operator dan masyarakat, disertai peningkatan transparansi informasi serta pengawasan lapangan. Langkah ini memastikan kebijakan tarif diterapkan adil, efektif, dan memberikan manfaat maksimal bagi pengguna layanan.

REFERENSI

- Abdurrahman, A. and Febrianty, R. (2017) 'Analisa Tarif Ideal Angkutan Barang Lintas Banjarmasin – Palangka Raya', *Jurnal Ilmiah Teknik Sipil TRANSUKMA*, 2(2), pp. 96–102. Available at: <https://transukma.uniba-bpn.ac.id/index.php/transukma/article/view/50>.
- Ahasan, R. *et al.* (2023) 'Changing Institutional Landscape and Transportation Development in Dhaka, Bangladesh', *Heliyon*, 9(7), p. e17887. Available at: <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e17887>.
- Dwi Astuti, S. *et al.* (2023) 'Pengaruh Moda Transportasi Darat Terhadap Kelancaran Bongkar Muat', *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Juli, 2023(13), pp. 599–607. Available at: <https://doi.org/10.5281/zenodo.8158069>.
- Elisabeth, C.R. and Yohanes, D. (2024) 'Biaya Operasional Dalam Penentuan Tarif Bus Akap Executive Class', *Jurnal Akuntansi*, 20(02), pp. 67–76. Available at: <https://doi.org/10.58457/akuntansi.v20i02.3910>.
- Harahap, A.R. (2019) 'Pengawasan Dinas Perhubungan terhadap Perizinan Angkutan Kota dalam Trayek Di Kota Medan', *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 2(2), pp. 412–427. Available at: <https://doi.org/10.34007/jehss.v2i2.101>.
- Herdiani, L., Sakinah, G.N. and Rohimat, R.I. (2021) 'Analisis Tarif Angkutan Umum Berdasarkan Ability To Pay, Willingness To Pay dan Biaya Operasional Kendaraan (Studi Kasus: Perum Damri Trayek: Cicaheum–Lewu Panjang)', *SAINTEK: Jurnal Ilmiah Sains Dan Teknologi Industri*, 5(1), pp. 1–10. Available at: <https://doi.org/10.32524/saintek.v5i1.245>.
- Ibrahim, A.W., Ahmad, I. and Moonti, R.M. (2024) 'Analisis Tantangan dan Hambatan dalam Penegakan

- Hukum Angkutan Antar Provinsi', *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora*, 1(4), pp. 60–72. Available at: <https://doi.org/10.62383/progres.v1i4.983>.
- Jalil, E., Anggraini, R. and Sugiarto, S. (2018) 'Analisis Biaya Operasional Kendaraan, Ability To Pay Dan Willingness To Pay Untuk Penentuan Tarif Bus Trans Koetaradja Koridor III', *Jurnal Arsip Rekayasa Sipil dan Perencanaan*, 1(4), pp. 1–10. Available at: <https://doi.org/10.24815/jarsp.v1i4.12449>.
- Kadarisman, M., Gunawan, A. and Ismiyati, I. (2016) 'Kebijakan Manajemen Transportasi Darat dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Masyarakat di Kota Depok', *Jurnal Manajemen Transportasi & Logistik (JMTRANSLOG)*, 3(1), pp. 1–18. Available at: <https://doi.org/10.54324/j.mtl.v3i1.140>.
- Laode, R.T. et al. (2025) 'Analysis of Management of Supervision and Law Enforcement of Public Goods Transportation in Regency of North Kolaka', *Synergy: Journal of Governance and Public Policy*, 1(1), pp. 20–29. Available at: <https://sinergijournal.id/index.php/sjgp/article/view/48>.
- Lukow, T., Rares, J.J. and Kawung, E.J. (2023) 'Implementasi Kebijakan Tarif Angkutan Umum Di Provinsi Sulawesi Utara (Studi Kasus Di Trayek Manado-Langowan)', *AGRI-SOSIOEKONOMI*, 19(2), pp. 1223–1234. Available at: <https://doi.org/10.35791/agrsosek.v19i2.50111>.
- Marlina, E. and Natalia, D.A. (2017) 'Land Transportation and Tourism Development', *Journal of Economic & Management Perspectives*, 11(2), pp. 542–554. Available at: https://www.researchgate.net/publication/328677091_Development_of_Land_Transportation_Towards_Empowered_Tourism_Sector_for_Betterment_of_Social_Welfare.
- Maruru, S.H.K. et al. (2024) 'Tinjauan Hukum terhadap Regulasi dan Pengawasan Layanan Transportasi Online (Studi Kasus Grab di Indonesia)', *Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora*, 6(02), pp. 176–183. Available at: <https://www.jurnalintelektiva.com/index.php/jurnal/article/view/1062>.
- Muguro, J.K., Njeri, P.W. and Sasaki, M. (2024) *Public Transportation in Kenya (A Phenomenological Study of Transport Issues)*. Bentham Science Publishers.
- Muñoz, J.C., Soza-Parra, J. and Raveau, S. (2020) 'A Comprehensive Perspective of Unreliable Public Transport Services' Costs', *Transportmetrica A: Transport Science*, 16(3), pp. 734–748. Available at: <https://doi.org/10.1080/23249935.2020.1720861>.
- Nuhun, R. et al. (2024) 'Peran Pemerintah dalam Penataan dan Penyelenggaraan Transportasi di Terminal Tipe B Baruga Kendari', *Bearing: Jurnal Penelitian dan Kajian Teknik Sipil*, 9(2), p. 111. Available at: <https://doi.org/10.32502/jbearing.v9i2.8423>.
- La Ode, A.T. et al. (2024) *Transportasi Publik*. Makassar: Tohar Media.
- Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 27 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara tentang Penetapan Tarif Jarak Angkutan Kabupaten/Kota Kelas Ekonomi di Jalan dengan Mobil Bus/Mobil Penumpang Umum dalam Provinsi Sulawesi Tenggara (no date).
- Rahayu, D.K. and Martini, S. (2022) 'Peran Moda Transportasi Darat Dalam Mobilitas Tenaga Kerja', *Jurnal Transportasi*, 22(2), pp. 109–116. Available at: <https://doi.org/10.26593/JTRANS.V22I2.6061.109-116>.
- Sajiwo, A. (2023) *Analisis Tarif Angkutan Umum Berdasarkan Biaya Operasional Kendaraan (Bok), Ability To Pay Dan Willingness To Pay*. Universitas Medan Area.
- Satyadharma, M. (2024) 'Pendampingan dan Sosialisasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pada Pengusaha dan Sopir Angkutan Barang Umum di Kota Baubau', *JCOMMITTS: Journal of Community Empowerment, Inovation, and Sustainability*, 2(2), pp. 13–20. Available at: <https://journal.unilak.ac.id/index.php/JCOMMITTS/article/view/21802>.
- Satyadharma, M. et al. (2024) 'Peran Teknologi Informasi Dan Mekanisme Collaborative Governance Mendukung Penyelenggaraan Transportasi Berkelanjutan di Provinsi Sulawesi Tenggara', *Media Konstruksi: Jurnal Ilmiah Teknik Sipil*, 9(3), pp. 211–218. Available at: <https://doi.org/10.33772/medkons.v9i3.59>.
- Satyadharma, M. et al. (2025) 'Sosialisasi dan Pendampingan Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Sektor Perhubungan', *Jurnal Pengabdian dan Inovasi*, 2(01), pp. 62–72. Available at: <https://journal.papsel.org/index.php/JPI/article/view/188>.
- Satyadharma, M. and Susanti, N. (2024) 'Collaborative Governance dalam Penyelenggaraan Transportasi

- Sektor Darat di Provinsi Sulawesi Tenggara', *LITERAKOM: Jurnal Literasi dan Komunikasi*, 2(1), pp. 1–14. Available at: <https://doi.org/10.24036/lk.v2i1.14>.
- Syaiful *et al.* (2024) 'Sosialisasi dan Edukasi Tentang Perizinan dan Pendirian Badan Hukum Bagi Para Pengusaha dan Pengemudi Angkutan Umum', *Jurnal Surya Abdimas*, 8(2), pp. 275–283. Available at: <https://doi.org/https://doi.org/10.37729/abdimas.v8i2.4347>.
- Tambuk, M.A.F., Aloysius, S. and Mauritsius, D. (2023) 'Faktor Penyebab dan Penanggulangan Pelanggaran Izin Trayek di Kabupaten Manggarai', *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara*, 1(4), pp. 174–192. Available at: <https://doi.org/10.55606/birokrasi.v1i4.734>.
- Wibowo, A.N.F. (2020) 'Collaborative Governance dalam pelayanan Transportasi Publik (Studi BRT Trans Semarang)', *Syntax Literate : Jurnal Ilmiah Indonesia*, 5(3).
- Winter, K. *et al.* (2018) 'Performance Analysis and Fleet Requirements of Automated Demand-Responsive Transport Systems as an Urban Public Transport Service', *International Journal of Transportation Science and Technology*, 7(2), pp. 151–167. Available at: <https://doi.org/10.1016/j.ijtst.2018.04.004>.